

## **Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Perempuan secara Daring dan Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional**

**Jose Segitya Hutabarat**  
SMP Dian Harapan Manado  
E-mail: [jose.hutabarat@sdh.or.id](mailto:jose.hutabarat@sdh.or.id)

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 memunculkan kekerasan perempuan secara daring harus segera ditangani sekarang. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang disaksikan selama krisis menyebar ke ruang *online*, hal ini mengubah jalur kehidupan internet menjadi ruang yang tidak bersahabat. Berbagai bentuk ancaman dan kekerasan digital hingga pelecehan seksual dan berbagi gambar intim tanpa izin serta pelecehan *online* yang menimbulkan kerugian mental dan fisik yang menghancurkan bagi perempuan dan anak perempuan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe dan strategi studi kasus deskriptif dan di analisis dari tinjauan dokumen resmi. Serangkaian rekomendasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara daring dimulai dari pemerintah yang memastikan sistem hukum dan penegakan hukum perlu disiapkan bagi perempuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, hingga perusahaan teknologi yang menerapkan desain produk dan layanan berbasis gender. Memastikan bahwa pemberian layanan bagi korban terintegrasi di seluruh bidang yang relevan dan kebutuhan serta keamanan bagi para korban dipertimbangkan saat bergerak menuju mode komunikasi yang lebih berbasis elektronik selama krisis Covid-19.

**Kata kunci:** Kekerasan perempuan, pelecehan daring, dan ketahanan nasional.

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic, which led to women's violence online, must be addressed now. The increase in domestic violence against women witnessed during the crisis spread to the online space, turning the lifeline of the internet into a hostile space. Various forms of threats and digital violence to sexual harassment and sharing of intimate images without permission and online harassment cause devastating mental and physical harm to women and girls. This paper uses a qualitative approach, with descriptive case study types and strategies and is analyzed from official document reviews. A series of recommendations for dealing with violence against women online starts from the government ensuring that the legal system and law enforcement needs to be prepared for women to take legal action against perpetrators, to technology companies that implement gender-based product and service designs. Ensure that service delivery for victims is integrated in all relevant areas and that the needs and security of victims are taken into account when moving towards a more electronic-based mode of communication during the Covid-19 crisis.*

**Keywords:** *Women's violence, online harassment, and national resilience*

## A. PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi sosial dari pandemi Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat mendorong kekerasan terhadap perempuan. Ketidakmampuan untuk keluar rumah, kehilangan interaksi sosial, kehadiran sepanjang hari anak-anak penutupan sekolah, ketegangan yang melekat kemungkinan besar merupakan sebuah alasan untuk membenarkan kekerasan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang sering dilakukan oleh laki-laki, sangat mengakar dalam maskulinitas patriarki yang mengarah pada kekuasaan dan kendali laki-laki atas perempuan. Pelaku kekerasan mungkin ingin menegaskan kembali kontrol mereka dan mengekspresikan frustrasi mereka yang disebabkan oleh *lockdown* melalui peningkatan adegan kekerasan.

Sekarang masyarakat menjalani kehidupan virtual dan sering mengalami kekerasan luring telah meluas ke daring, yang memudahkan orang untuk melakukan kekerasan tanpa konsekuensi. Perempuan menjadi sasaran utama kekerasan secara daring, pelecehan daring dapat mencakup penindasan daring, penguntitan dunia maya, pencemaran nama baik dan perkataan yang mendorong kebencian, penghinaan di depan umum, serta pencurian dan peretasan identitas. Ketika perempuan menjadi targetnya, pelecehan daring dengan cepat berubah menjadi

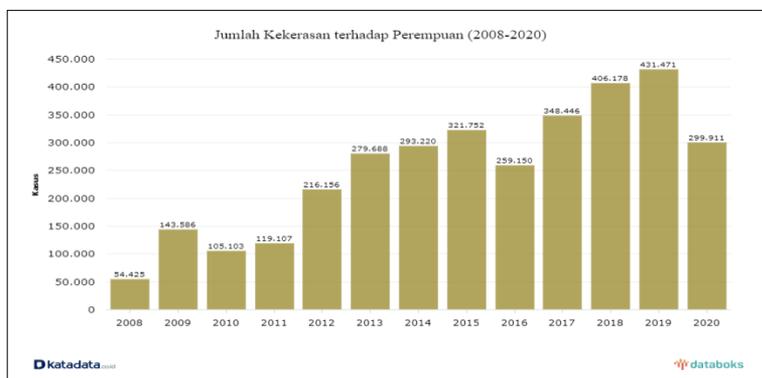
kebencian atau ancaman seksual. Kekerasan berbasis gender *online* adalah ekspresi terbuka dari ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan masalah universal. Kekerasan akan mengakibatkan dampak parah pada korban, keluarga, dan ikatan masyarakat, terutama pada saat pandemi Covid-19. Hal ini di perparah karena stres akibat ekonomi dan sosial ditambah dengan gerakan terbatas oleh langkah-langkah isolasi dan sosial, sehingga kekerasan berbasis gender meningkat secara eksponensial selama Covid-19. Kekerasan terhadap perempuan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan daring yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan terjadi dalam konteks yang luas menyebarkan diskriminasi berbasis gender yang sistemik. Sedangkan secara global masih kekurangan definisi yang komprehensif dan data kekerasan daring yang difasilitasi TIK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan ditargetkan secara tidak proporsional dan menderita serius sebagai konsekuensi akibat perempuan memiliki akses ke internet. Mereka menghadapi kekerasan daring lebih sering dari pada laki-laki melalui suatu kontinum

dari berbagai bentuk, berulang dan saling terkait kekerasan berbasis gender. UN Women (2020b) melaporkan frekuensi perempuan menggunakan internet selama pandemi meningkat dan menimbulkan kesenjangan digital berbasis gender, saat tindakan kebijakan nasional untuk karantina wilayah telah meningkatkan penggunaan internet 50 persen sampai 70 persen, perempuan dan laki-laki beralih ke internet untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sosial. Selama periode ini, pengguna dengan keterbatasan keterampilan digital lebih berisiko mengalami kekerasan dunia maya. Namun, menariknya pembagian gender digital, perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami bentuk kekerasan.

Dalam konteks ini, kekerasan yang difasilitasi TIK telah menyebar di bawah bayang-bayang pandemi terhadap kekerasan perempuan. UN Women (2020a) juga melaporkan perempuan mengalami kekerasan daring berupa ancaman fisik, pelecehan seksual, menguntit, *zoom-bombing*, dan *sextrolling*. Kasus-kasus khusus telah didokumentasikan oleh media dan organisasi hak-hak perempuan dengan cara perempuan diminta membuat video porno dan ditampilkan saat perempuan berpartisipasi dalam acara sosial daring. Lebih lanjut UN Women (2020a) ancaman kekerasan dan konten seks yang berbahaya saat *zoombombing* selama panggilan video ditampilkan materi yang bermuatan rasial dan seksual eksplisit kepada peserta.



Gambar 1. Jumlah kekerasan terhadap perempuan (2008-2020)  
 Sumber: Jayani (2021a)

Komnas Perempuan dalam (Jayani, 2021a) mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang

dilaporkan sebanyak 299.911 kasus pada 2020, menurun 31,5 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai

431.471 kasus (lihat Gambar 1). Secara rinci, ada 291.677 kasus kekerasan yang berasal dari Pengadilan Agama. Sementara, 8.234 kasus berasal dari data kuesioner lembaga penyedia layanan. Merujuk hasil survei KTP di masa pandemi virus corona Covid-19, penurunan laporan terjadi karena korban dekat dengan pelaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Korban juga cenderung mengadukan kasus kekerasan pada keluarga atau diam. Ada pula faktor literasi teknologi dan model layanan pengaduan yang belum siap pada masa pandemi Covid-19, layanan pengaduan ini berkaitan dengan adaptasi menjadi sistem daring.

Dalam konteks ini, kasus kekerasan daring menggunakan TIK terhadap perempuan dan anak perempuan cenderung meningkat bahkan setelah fase darurat karena melemahkan penegakan dan persentase individu yang menggunakan internet. Bentuk kekerasan dalam jaringan terhadap perempuan dan anak perempuan berimplikasi pada psikologis, hubungan sosial, dan kesehatan reproduksi. Tidak hanya secara daring, kekerasan fisik dan seksual luring pun sering terjadi. Kekerasan daring dilakukan dalam kontinum antara daring dan luring, dan sulit untuk membedakan konsekuensi dari tindakan yang dimulai dalam lingkungan digital dari realitas luring, dan sebaliknya. Penelitian ini

juga mengungkapkan beberapa konsekuensi tentang dampak daring pengalangan perempuan meningkatkan kecemasan yang lebih tinggi, gangguan stres, depresi, trauma, serangan panik, kehilangan rasa percaya diri dan rasa tidak berdaya dalam kemampuan mereka. Perasaan ini mungkin saja ditingkatkan dalam konteks karantina dan isolasi yang terbatas pada rumah tangga mereka termasuk masalah ekonomi, hubungan sosial dan tekanan politik sehingga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu analisis mengenai kondisi yang dialami perempuan di masa pandemi Covid-19 yang mengalami kekerasan secara terkini di Indonesia. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga melalui jurnal-jurnal penelitian nasional dan internasional dan laporan atau *brief* dari *United Nations Women* entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan dari sumber berita *daring* dan cetak resmi.

### **1. Kekerasan Perempuan secara Daring**

Perempuan cenderung membatasi akses mereka secara daring sebagai akibat

dari kekerasan secara daring. Negara yang terkena Covid-19 menyediakan beragam layanan daring, termasuk sekolah kelas, bahan makanan, pasar/perdagangan elektronik, lingkungan kesehatan dan dukungan hukum dan layanan penting. Meningkatkan kekerasan daring mengubah penggunaan internet oleh perempuan dan akses ke layanan *daring*. Di sisi lain, keamanan alat digital dan internet, terjangkau dan inklusif dalam skala besar berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan secara daring untuk mengurangi jenis kesenjangan digital. Suara dan partisipasi perempuan sebagai warga aktif digital sering dikecam dan dilecehkan dalam media *daring* selama Covid-19.

Partisipasi inklusif dari perempuan, terutama dari mereka yang biasanya tertinggal, sangat penting untuk menanggapi, memitigasi demi pemulihan dari krisis. Namun, bukti menunjukkan bahwa perempuan sering kali jadi target diskriminasi *daring* dan mendapatkan ujaran kebencian. Akibatnya, kecenderungan menarik diri dari perdebatan dan diskusi di media sosial. Selama pandemi, lebih banyak perempuan menggunakan internet dan media sosial untuk mengadvokasi hak-hak mereka dalam tautan terbuka. Risiko lebih tinggi ditargetkan telah terjadi pembaharuan minat menggunakan internet dan media sosial untuk terhubung dengan komunitas lokal, upaya memberikan kesempatan terbaik untuk

dukungan terus-menerus kohesi sosial, ketika akses ke ruang publik terbatas.

## **2. Ketahanan Nasional dalam Perspektif Perempuan**

Merebaknya Covid-19 dan ekstrimisme agama semakin meningkatkan potensi konflik. Kondisi ini mempengaruhi kapasitas membangun dan mencapai cita-cita nasional. Dalam setiap kondisi konflik tersebut, perempuan menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung dan posisi ini tidak lepas dari konstruksi gender di dalam masyarakatnya. Karenanya, penting membangun kesadaran akan gender untuk memastikan bahwa stereotip gender tidak terus dilestarikan dan hak-hak perempuan tidak diabaikan. Masyarakat harus memiliki perspektif keadilan gender, membangun pengetahuan yang berbasiskan kekhasan pengalaman perempuan, khususnya dalam konteks konflik, perdamaian, dan ketahanan nasional (*Membangun perdamaian dunia ...*, 30 November 2020).

Menurut United Nations Development Programme (2011), perempuan secara konsisten diidentifikasi sebagai salah satu kelompok paling rentan terhadap bahaya marjinalisasi sosial, kurangnya mobilitas dan pengucilan dari pengambilan keputusan. Proses tersebut diperparah dengan kerentanan yang mereka alami. Namun, pemerintah perlu

mengembangkan upaya yang dapat memberdayakan perempuan sampai akar rumput untuk mengubah kondisi kehidupan keluarga dan komunitas mereka dan untuk membalikkan kerentanan ini. Dalam pembuatan kebijakan, misalkan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan kemiskinan. Perempuan tidak dapat dipisahkan terkait membangun ketahanan nasional dengan memajukan prioritas pembangunan. Mengeksplorasi hubungan antara ketidaksetaraan berbasis gender didukung oleh serangkaian menunjukkan kepemimpinan perempuan dalam mengamankan sumber daya untuk mengatasi masalah pembangunan yang paling mendesak dari komunitas mereka. Memberdayakan perempuan untuk menjadipemimpin dan penggerak proses pembangunan yang akan membantu mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kerentanan perempuan.

### **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020) persoalan kekerasan juga memiliki keterkaitan dengan persoalan ketahanan nasional. Hal ini bisa dipahami bila melihat ketahanan nasional sebagai kemampuan merespons, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari ancaman pada martabat kemanusiaan

perempuan di Indonesia yang seharusnya dapat hidup dengan rasa aman dan damai. Oleh karenanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara meluas merupakan persoalan yang terkait dengan aspek pancagatra ketahanan nasional yaitu aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek pertahanan keamanan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman besar bagi kemajuan kesetaraan gender. Perlu memastikan ruang digital *online* adalah tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Teknologi digital menjadi satu cara bagi perempuan untuk diserang, ditekan, dan dipinggirkan daripada menjadi platform untuk bersuara, meraih peluang dan melakukan perubahan yang positif bisa terjadi. Itulah mengapa sangat penting bagi perusahaan teknologi dan pemerintah untuk bekerja sama dengan aktivis perempuan dan komunitas teknologi sipil yang lebih luas untuk mengatasi kekerasan secara daring dan membuat web aman serta memberdayakan semua orang. Kekerasan perempuan secara daring ada dalam konteks yang mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Itu sama merusaknya dengan kekerasan *offline*.

### **D. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Rukin (2019)

penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel (Arikunto, 2006). Tipe dan strategi yang digunakan studi kasus untuk memahami suatu persoalan mengenai kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik. “Penelitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, holistik dan sistematis tentang orang. Metode dan teknik menggunakan banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf 2017).” Dalam konteks penelitian ini kasus yang diteliti kelompok perempuan dengan klasifikasi studi kasus deskriptif.

Desain penelitian kualitatif bersifat umum fleksibel dan terbuka. Data dianalisis secara deskriptif dari sumber dokumen yang dikaji pada saat penelitian dilakukan. Menurut Moleong (2018) penggunaan dokumen membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki yaitu dokumen resmi eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita

yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah fenomena yang akan diteliti. Menganalisis dokumen tersebut secara sistemik dengan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Menampilkan data kuantitatif yang berbobot bersama analisis kualitatif.

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Banyak bentuk pelecehan *online* telah meroket selama krisis Covid-19 karena kehidupan telah bergeser secara daring dan orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di perangkat digital. Alhasil menempatkan perempuan diposisi yang lebih rentan. Misalnya, ada lonjakan dalam berbagi gambar tanpa persetujuan yang dirancang untuk mengancam, memermalukan, dan mengontrol perempuan.

Distribusi atau ancaman berbagi gambar intim non-konsensual juga terjadi sebagian besar dalam konteks kekerasan pasangan intim. Pelecehan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesejahteraan mental para korban karena mereka sering dibiarkan sendiri dengan pengalaman mereka, sebuah pengalaman yang dinormalisasi dan tidak terlihat di media sosial dan di masyarakat secara umum, mendorong korban untuk diam dan malu, mengekspos mereka kepada pelakunya, dan terkadang membuat mere-

ka menyakiti diri sendiri, depresi, dan bunuh diri.

### **1. Tren dan Dampak Kekerasan Secara Daring**

Pandemi Covid-19 berdampak pada akses perempuan ke berbagai layanan penting seperti sosial, kesehatan dan layanan hukum. Tantangan tersebut antara lain: kesadaran terbatas akan layanan tersebut dan ketersediaan akses ke teknologi, serta langkah-langkah tertentu untuk mengekang pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tantangan untuk membuat platform lebih aman telah diperburuk karena moderator media sosial membuat moderasi konten lebih bergantung pada alat kecerdasan buatan yang tidak sempurna. Seiring waktu, perusahaan teknologi telah mengembangkan beberapa solusi produk seperti alur pelaporan yang lebih baik untuk pelecehan. Tetapi jauh lebih banyak yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman pelecehan perempuan dan anak perempuan terutama pada saat-saat seperti kekerasan daring terjadi.

Perempuan memiliki informasi terbatas dan kesadaran tentang layanan yang tersedia. Disebabkan oleh gangguan layanan umum dan ketidakteraturan penyediaan layanan. Di sisi lain liputan media sangat terfokus tentang pandemi, dengan penyebaran di berbagai wilayah. Alih-alih perempuan mengalami keke-

rasan dan layanan untuk menjangkau perempuan dibatasi oleh kebijakan jaga jarak fisik, atau kurangnya efektivitas saluran komunikasi. Kebijakan untuk mengatasi pandemi, yaitu dengan jaga jarak fisik dan instruksi agar tetap berada di dalam rumah, ternyata telah mengganggu ketersediaan dan aksesibilitas kepada layanan bagi korban kekerasan.

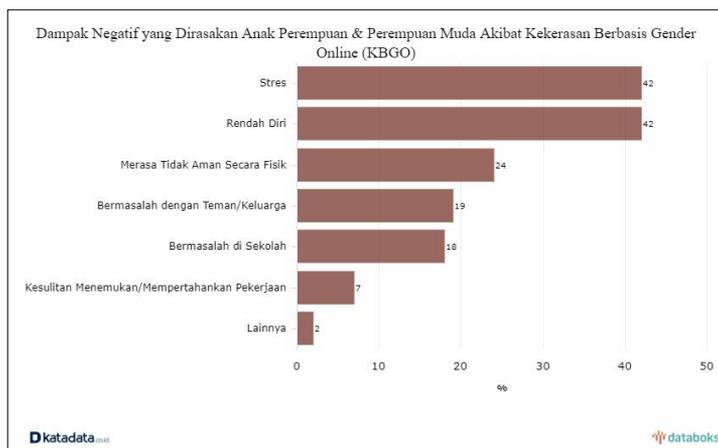
Korban kekerasan perempuan kesulitan dalam mengakses tempat penampungan, mencari saluran bantuan layanan psiko-sosial yang dihadapi imbas penutupan operasional serta kurang kesiapan untuk merespons pandemi. Masyarakat diwajibkan mengisolasi diri atau memberikan bukti medis sebelum dirawat di tempat penampungan pasien Covid-19. Padahal layanan tertentu tersedia dari jarak jauh yang dapat diakses ke layanan daring karena keterbatasan kuota/jaringan internet.

### **2. Dampak dan Pelaku Kekerasan Daring terhadap Perempuan**

Dalam laporan Databoks Indonesia Tahun 2020 dalam (Jayani, 2021) terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dialami anak perempuan dan perempuan muda memiliki dampak negatif terhadap kehidupannya sehari-hari. *Riset Plan International* menunjukkan, sebanyak 42 persen korban mengalami gangguan mental atau stres. Selain itu, korban juga mengalami rendah

diri (42%) dan merasa tidak aman secara fisik (24%). Perhatikan Gambar 2. Riset yang dilakukan melibatkan 14 ribu anak

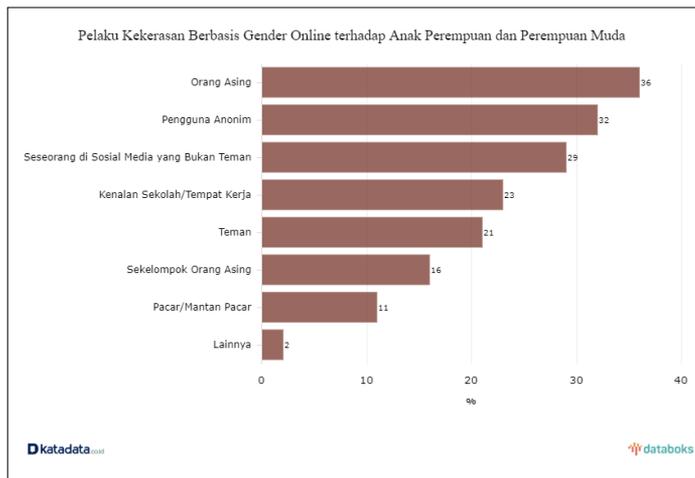
perempuan di 31 negara dunia. Sebanyak 500 anak dan perempuan muda Indonesia terlibat dalam riset tersebut.



Gambar 2. Dampak negatif akibat kekerasan berbasis gender *online* (KBGO)  
Sumber: Jayani (2021b)

Selanjutnya dalam (Jayani, 2021b) dari keseluruhan responden, mayoritas mengaku tidak mengenal pelaku KBGO. Rinciannya, 36 persen adalah orang asing, 32 persen pengguna tanpa identitas (anonim), 29 persen seseorang di media sosial yang bukan teman, dan 16 persen sekelompok orang asing. Namun, bukan berarti orang terdekat tidak berpotensi menjadi pelaku. Sebanyak 23 persen pelaku merupakan kenalan di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, sebanyak 21 persen merupakan teman dan 11 persen pacar/mantan pacar. Lihat Gambar 3.

Data yang tersedia, dari laporan media semuanya mengarah pada peningkatan kerentanan dan risiko faktor kekerasan bagi perempuan dan anak perempuan selama pandemi. Kasus-kasus kemungkinan besar merupakan perkiraan yang diremehkan dari tingkat besarnya masalah, karena pandemi dan keadaannya membuat lebih sulit bagi perempuan untuk membuat laporan atau mencari bantuan. Dampak pandemi pada keluarga dan pendapatan perempuan meningkatkan risiko yang berujung menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi.



Gambar 3 Pelaku KGBO terhadap anak perempuan dan perempuan muda  
 Sumber: Jayani (2021b)

Krisis atau tanggap darurat membutuhkan upaya terkoordinasi dan terpadu oleh semua tokoh yang relevan. Lembaga pemerintah perlu mengoordinasikan tanggapan untuk mendukung korban kekerasan. Membuat mekanisme untuk mendukung perempuan tentang informasi bagaimana melaporkan kasus kekerasan dan cara mengakses layanan melalui telepon atau situs web resmi. Melakukan penilaian cepat untuk memahami kebutuhan perempuan, dengan pemangku kepentingan untuk memahami dan menialai kebutuhan selama krisis (UN Women, 2020a). Organisasi perempuan bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk memastikan sosio-ekonomi dalam lensa gender di intervensi

upaya mengatasi peningkatan risiko kekerasan bagi perempuan.

Dibutuhkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan secara daring adalah masalah besar. Ini adalah kekerasan nyata dengan dampak nyata, dan terkadang berpindah dari daring ke luring. Perlu keamanan digital untuk melindungi identitas seseorang secara daring. Keamanan digital gender mencakup keterampilan perempuan dan anak perempuan untuk melindungi diri mereka sendiri, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan saat *online*. Perempuan dan anak perempuan harus tahu bahwa mereka adalah bagian dari media sosial dan itu adalah hak mereka untuk *online*. Upaya membantu agar perempuan aman dalam aplikasi daring seperti

Instagram yang baru-baru ini menambahkan alat anti-intimidasi, membatasi komentar yang tersedia untuk semua orang.

## **F. PENUTUP**

Pada dasarnya, semua respons kebijakan terhadap krisis harus menanamkan lensa gender dan memperhitungkan kebutuhan unik perempuan, tanggung jawab dan perspektif. Sangat penting untuk mengatasi peningkatan kekerasan daring menggunakan perangkat TIK terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Diperlukan tindakan berbasis bukti hingga upaya bersama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil. Tanggapan dan rencana aksi yang ditujukan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah perlu memperkuat protokol hukum yang terspesialisasi, jelas, dan efisien oleh penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap perempuan secara daring selama pandemi Covid-19.

Terus berinvestasi pada upaya dalam menangani kekerasan secara daring dengan pendekatan hak asasi manusia dan gender. Memberi informasi kepada pengguna internet tentang protokol, tempat melaporkan kasus kekerasan secara daring yang, dengan cara mengakses layanan penting secara daring selama pandemi Covid-19. Memberi arahan untuk menangani eksploitasi seksual bagi

anak perempuan secara daring dan pornografi anak. Memberikan contoh praktik baik yang menjanjikan secara efektif dalam menangani, memfasilitasi dengan teknologi untuk menginformasikan kepada berbagai pemangku kepentingan (perempuan di akar rumput, organisasi perempuan, pemerintah, penyedia teknologi dan pengembang).

Secara aktif melibatkan organisasi hak-hak perempuan untuk mengembangkan panduan dan praktik yang baik tentang keamanan dan inklusif TIK untuk perempuan. Menjaga dan memperluas saluran bantuan khusus untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang telah menjadi sasaran kekerasan berbasis gender daring dan luring selama pandemi Covid-19. Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pembela perempuan, pendidik, dan pengguna internet untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan yang difasilitasi secara daring dan oleh bentuk kekerasan berbasis TIK lainnya. Memberikan alat dan sumber daya tentang cara mengidentifikasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelecehan daring dan bentuk lainnya. Menghasilkan materi komunikasi dalam format sederhana dan ramah pengguna yang menunjukkan bahaya dampak kekerasan terhadap kelompok perempuan dan anak perempuan bagi mereka yang berada di kehidupan politik.

Membagikan pemahaman dan pendekatan titik temu untuk komunitas yang mengalami berbagai bentuk penindasan dan pelecehan daring, sebagai bagian dari rangkaian kekerasan. Mempromosikan kepemimpinan perempuan adalah elemen fundamental yang diperlukan dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap akses tantangan ke depan dan dalam memastikan perdamaian bisa terlaksana dengan menghasilkan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan nasional. Mendalami ancaman yang dialami oleh perempuan, termasuk risiko spesifik yang mereka hadapi dalam bentuk ujaran kebencian rasial dan pelecehan seksual serta ancaman dan serangan yang berbasis gender dan rasial. Mendesain kebijakan di mana hak-hak perempuan bagi perusahaan teknologi bekerja sama untuk membangun kebijakan dan produk untuk menangani kekerasan berbasis gender *online*.

### Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi VI)* (13th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Jayani, D.H. (2021a). *Hampir 300 Ribu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terjadi pada 2020*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/hampir-300-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terjadi-pada-2020> (21 April 2021).
- Jayani, D.H. (2021b). *Ragam Dampak Negatif Kekerasan Online terhadap Anak Perempuan*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/16/ragam-dampak-negatif-kekerasan-online-terhadap-anak-perempuan> (21 April 2021).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020). *Menata langkah dalam ketidakpastian: Menguatkan gerak juang perempuan di masa pandemi Covid-19*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rukin (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia.
- Membangun perdamaian dunia dan ketahanan nasional dengan pengakuan kontribusi berarti dan pelibatan substantif perempuan*. Siaran Pers Komnas Perempuan dan Lemhannas (30 November 2020). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-and-lemhannas-membangun-perdamaian-dunia-dan-ketahanan-nasional-dengan-pengakuan-kontribusi-berarti-dan-pelibatan-substantif-perempuan-30-november-2020> (21 April 2021).

UN Women (2020a). *Impact of covid-19 on violence against women and girls and service provision: UN Women rapid assessment and findings*. Diakses dari <https://data.unwomen.org/publications/impact-covid-19-violence-against-women-and-girls-and-service-provision-un-women-rapid> (21 April 2021).

UN Women (2020b). *Online and ICT-facilitated violence against women and girls during Covid-19*. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief>

-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19 (21 April 2021)

United Nations Development Programme (2011). *Leading resilient development: Grassroots women's priorities, practices and innovations*. Diakses dari <https://www.undp.org/publications/leading-resilient-development-grassroots-practices-innovations> (21 April 2021)

Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan* (4th ed.). Jakarta: Kencana.